



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LINGKUANG AUA TIMUR,
PEMERINTAHAN NAGARI LINGKUANG AUA BARU, PEMERINTAHAN NAGARI
LINGKUANG AUA BANDARAO, PEMERINTAHAN NAGARI LINGKUANG AUA
JAMBAK, PEMERINTAHAN NAGARI LINGKUANG AUA KOTO DALAM,
PEMERINTAHAN NAGARI LINGKUANG AUA BARAT DAN PEMERINTAHAN
NAGARI LINGKUANG AUA HILIA
DI KECAMATAN PASAMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola nagari dan meningkatkan daya saing nagari perlu dilakukan pembentukan nagari melalui pemekaran nagari;
 - b. bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud huruf a adalah dalam rangka merealisasikan kehidupan masyarakat yang sejahtera;
 - c. bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa dan Ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari, perlu dilakukan Pemekaran Nagari Lingkuang Aua di Kecamatan Pasaman.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lingkuang Aua Timur, Pemerintahan Nagari Lingkuang Aua Baru, Pemerintahan Nagari Lingkuang Aua Bandarao, Pemerintahan Nagari Lingkuang Aua Jambak,

Pemerintahan Nagari Lingkuang Aua Koto Dalam, Pemerintahan Nagari Lingkuang Aua Barat dan Pemerintahan Nagari Lingkuang Aua Hilia di Kecamatan Pasaman.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

dan

BUPATI PASAMAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LINGKUANG AUA TIMUR, PEMERINTAHAN NAGARI LINGKUANG AUA BARU, PEMERINTAHAN NAGARI LINGKUANG AUA BANDARAJO, PEMERINTAHAN NAGARI LINGKUANG AUA JAMBAK, PEMERINTAHAN NAGARI LINGKUANG AUA KOTO DALAM, PEMERINTAHAN NAGARI LINGKUANG AUA BARAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI LINGKUANG AUA HILIA DI KECAMATAN PASAMAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Desa selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Nagari.
6. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Nagari Induk adalah Nagari yang mengalami pemekaran Nagari di Wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
9. Pembentukan Pemerintahan Nagari adalah Pembentukan Pemerintahan Nagari dari 1 (satu) Pemerintahan Nagari menjadi 2 (dua) atau lebih Pemerintahan Nagari Baru.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:
 - a. Nagari Lingkuang Aua Timur;
 - b. Nagari Lingkuang Aua Baru;
 - c. Nagari Lingkuang Aua Bandarajo;
 - d. Nagari Lingkuang Aua Jambak;
 - e. Nagari Lingkuang Aua Koto Dalam;
 - f. Nagari Lingkuang Aua Barat; dan
 - g. Nagari Lingkuang Aua Hilia.

- (2) Nagari Lingkuang Aua Timur, Nagari Lingkuang Aua Baru, Nagari Lingkuang Aua Bandarajo, Nagari Lingkuang Aua Jambak, Nagari Lingkuang Aua Koto Dalam, Nagari Lingkuang Aua Barat dan Nagari Lingkuang Aua Hilia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g berasal dari Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman dengan Kode Nagari 13.12.03.2003.

Bagian Kedua

Nagari Lingkuang Aua Timur

Pasal 3

Nagari Lingkuang Aua Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dengan jumlah penduduk 5.466 jiwa/1.393 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Lingkuang Aua yang terdiri dari :

- a. Jorong Kampung Cubadak; dan
- b. Jorong Rimbo Binuang.

Pasal 4

- (1) Nagari Lingkuang Aua Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Lingkuang Aua Baru;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Lingkuang Aua Bandarajo dan Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Lingkuang Aua; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Suko Mananti Aua Kuniang dan Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang.
- (2) Peta batas wilayah Nagari Lingkuang Aua Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Lingkuang Aua Timur ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Luas wilayah Nagari Lingkuang Aua Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah 12,159 KM².

Bagian Ketiga
Nagari Lingkuang Aua Baru

Pasal 6

Nagari Lingkuang Aua Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan jumlah penduduk 7.113 jiwa/1.708 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Lingkuang Aua yang terdiri dari :

- a. Jorong Pasaman Baru; dan
- b. Jorong Rimbo Janduang.

Pasal 7

- (1) Nagari Lingkuang Aua Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Muara Kiawai Hilir Kecamatan Gunung Tuleh dan Nagari Aia Gadang Timur;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Lingkuang Aua dan Nagari Lingkuang Aua Timur;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Lingkuang Aua Koto Dalam, Nagari Lingkuang Aua Barat, Nagari Aia Gadang dan Nagari Aia Gadang Timur; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Sukomananti Aua Kuniang, Nagari Aua Kuniang, Nagari Kajai dan Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau.
- (2) Peta batas wilayah Nagari Lingkuang Aua Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Lingkuang Aua Baru ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Luas wilayah Nagari Lingkuang Aua Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah 36,490 KM².

Bagian Keempat
Nagari Lingkuang Aua Bandarajo

Pasal 9

Nagari Lingkuang Aua Bandarajo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dengan jumlah penduduk 3.319 jiwa/940 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Lingkuang Aua yaitu Jorong Bandarajo;

Pasal 10

- (1) Nagari Lingkuang Aua Bandarajo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Lingkuang Aua dan Nagari Lingkuang Aua Timur;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Lingkuang Aua Jambak;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Lingkuang Aua dan Nagari Lingkuang Aua Jambak; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Lingkuang Aua Timur.
- (2) Peta batas wilayah Nagari Lingkuang Aua Bandarajo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Lingkuang Aua Bandarajo ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Luas wilayah Nagari Lingkuang Aua Bandarajo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah 5,029 KM².

Bagian Kelima
Nagari Lingkuang Aua Jambak

Pasal 12

Nagari Lingkuang Aua Jambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dengan jumlah penduduk 3.693 jiwa/965 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Lingkuang Aua yaitu Jorong Jambak.

Pasal 13

- (1) Nagari Lingkuang Aua Jambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Lingkuang Aua dan Nagari Lingkuang Aua Bandarajo;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Jambak Selatan Kecamatan Luhak Nan Duo;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang dan Nagari Ophir Kecamatan Luhak Nan Duo.
- (2) Peta batas wilayah Nagari Lingkuang Aua Jambak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Lingkuang Aua Jambak ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Luas wilayah Nagari Lingkuang Aua Jambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah 7,233 KM².

Bagian Keenam Nagari Lingkuang Aua Koto Dalam

Pasal 15

Nagari Lingkuang Aua Koto Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dengan jumlah penduduk 3.205 jiwa/830 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Lingkuang Aua yaitu Jorong Katimaha.

Pasal 16

- (1) Nagari Lingkuang Aua Koto Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Lingkuang Aua Baru;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Lingkuang Aua;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Lingkuang Aua Barat; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Lingkuang Aua.

- (2) Peta batas wilayah Nagari Lingkuang Aua Koto Dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Lingkuang Aua Koto Dalam ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

Luas wilayah Nagari Lingkuang Aua Koto Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) adalah 4,983 KM².

Bagian Ketujuh
Nagari Lingkuang Aua Barat

Pasal 18

Nagari Lingkuang Aua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dengan jumlah penduduk 3.512 jiwa/843 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Lingkuang Aua yaitu Jorong Batang Biyu.

Pasal 19

- (1) Nagari Lingkuang Aua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
- a. Sebelah utara berbatasan dengan Nagari Aia Gadang Timur dan Nagari Lingkuang Aua Baru;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Lingkuang Aua dan Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Lingkuang Aua Hilia; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Lingkuang Aua Koto Dalam dan Nagari Lingkuang Aua Baru.
- (2) Peta batas wilayah Nagari Lingkuang Aua Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Lingkuang Aua Barat ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Luas wilayah Nagari Lingkuang Aua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) adalah 23,339 KM².

Bagian Kedelapan Nagari Lingkuang Aua Hilia

Pasal 21

Nagari Lingkuang Aua Hilia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf g dengan jumlah penduduk 4.022 jiwa/962 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Lingkuang Aua yaitu Jorong Tanjuang Pangka.

Pasal 22

- (1) Nagari Lingkuang Aua Hilia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Aia Gadang Barat, Nagari Aua Sarumpun dan Nagari Ranah Air Haji Kecamatan Sungai Aur;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Maligi dan Nagari Sasak; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Lingkuang Aua Barat dan Nagari Aia Gadang.
- (2) Peta batas wilayah Nagari Lingkuang Aua Hilia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Lingkuang Aua Hilia ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

Luas wilayah Nagari Lingkuang Aua Hilia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) adalah 70,313 KM².

Pasal 24

Dengan dibentuknya Nagari Lingkuang Aua Timur, Nagari Lingkuang Aua Baru, Nagari Lingkuang Aua Bandarajo, Nagari Lingkuang Aua Jambak, Nagari Lingkuang Aua Koto Dalam, Nagari Lingkuang Aua Barat dan Nagari Lingkuang Aua Hilia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Wilayah Nagari Lingkuang Aua dikurangi dengan Wilayah Nagari Lingkuang Aua Timur, Nagari

Lingkuang Aua Baru, Nagari Lingkuang Aua Bandarajo, Nagari Lingkuang Aua Jambak, Nagari Lingkuang Aua Koto Dalam, Nagari Lingkuang Aua Barat dan Nagari Lingkuang Aua Hilia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 21.

BAB III
PEMERINTAHAN NAGARI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 25

Penjabat Wali Nagari dilantik bersamaan dengan diresmikannya Nagari oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

Pemerintahan Nagari diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS Nagari.

Bagian Kedua
Kewenangan Nagari
Pasal 27

Kewenangan Nagari Lingkuang Aua Timur, Nagari Lingkuang Aua Baru, Nagari Lingkuang Aua Bandarajo, Nagari Lingkuang Aua Jambak, Nagari Lingkuang Aua Koto Dalam, Nagari Lingkuang Aua Barat dan Nagari Lingkuang Aua Hilia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) mencakup:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala nagari;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Badan Permusyawaratan Nagari
Pasal 28

- (1) Dengan dibentuknya Nagari Lingkuang Aua Timur, Nagari Lingkuang Aua Baru, Nagari Lingkuang Aua Bandarajo, Nagari Lingkuang Aua Jambak, Nagari Lingkuang Aua Koto Dalam, Nagari Lingkuang Aua Barat dan Nagari

Lingkuang Aua Hilia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka dibentuk BAMUS Nagari di Nagari Lingkuang Aua Timur, Nagari Lingkuang Aua Baru, Nagari Lingkuang Aua Bandarajo, Nagari Lingkuang Aua Jambak, Nagari Lingkuang Aua Koto Dalam, Nagari Lingkuang Aua Barat dan Nagari Lingkuang Aua Hilia.

(2) Ketentuan mengenai Pembentukan BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penjabat Wali Nagari
Pasal 29

Dengan dibentuknya Nagari Lingkuang Aua Timur, Nagari Lingkuang Aua Baru, Nagari Lingkuang Aua Bandarajo, Nagari Lingkuang Aua Jambak, Nagari Lingkuang Aua Koto Dalam, Nagari Lingkuang Aua Barat dan Nagari Lingkuang Aua Hilia, Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari Lingkuang Aua Timur, Penjabat Wali Nagari Lingkuang Aua Baru, Penjabat Wali Nagari Lingkuang Aua Bandarajo, Penjabat Wali Nagari Lingkuang Aua Jambak, Penjabat Wali Nagari Lingkuang Aua Koto Dalam, Penjabat Wali Nagari Lingkuang Aua Barat dan Penjabat Wali Nagari Lingkuang Aua Hilia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilantik bersamaan dengan diresmikannya Nagari oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan tugas, wewenang dan kewajiban yang sama dengan Wali Nagari.
- (3) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain :
 - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Nagari;
 - b. Membentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
 - c. Mengangkat Perangkat Nagari;
 - d. Memfasilitasi Pengisian Anggota BAMUS Nagari;
 - e. Membentuk Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - f. Memfasilitasi Pemilihan Wali Nagari Serentak.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 melaksanakan Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban serta Larangan bagi Wali Nagari sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari.

Pasal 32

- (1) Perangkat Nagari dan Anggota BAMUS Nagari Lingkuang Aua yang berdomisili di masing-masing wilayah Nagari Lingkuang Aua Timur, Nagari Lingkuang Aua Baru, Nagari Lingkuang Aua Bandarajo, Nagari Lingkuang Aua Jambak, Nagari Lingkuang Aua Koto Dalam, Nagari Lingkuang Aua Barat dan Nagari Lingkuang Aua Hilia menjadi Perangkat Nagari dan Anggota BAMUS Nagari di Nagari Lingkuang Aua Timur, Nagari Lingkuang Aua Baru, Nagari Lingkuang Aua Bandarajo, Nagari Lingkuang Aua Jambak, Nagari Lingkuang Aua Koto Dalam, Nagari Lingkuang Aua Barat dan Nagari Lingkuang Aua Hilia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai aset Nagari Lingkuang Aua Timur, Nagari Lingkuang Aua Baru, Nagari Lingkuang Aua Bandarajo, Nagari Lingkuang Aua Jambak, Nagari Lingkuang Aua Koto Dalam, Nagari Lingkuang Aua Barat dan Nagari Lingkuang Aua Hilia diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Nagari Lingkuang Aua Timur, Nagari Lingkuang Aua Baru, Nagari Lingkuang Aua Bandarajo, Nagari Lingkuang Aua Jambak, Nagari Lingkuang Aua Koto Dalam, Nagari Lingkuang Aua Barat dan Nagari Lingkuang Aua Hilia berhak mendapatkan Dana Transfer dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten serta lain-lain pendapatan yang sah sesuai peraturan Perundang-undangan.
- (2) Nagari Lingkuang Aua mengalokasikan anggaran biaya melalui APB Nagari Lingkuang Aua untuk menunjang kegiatan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan pada Nagari Lingkuang Aua Timur, Nagari Lingkuang Aua Baru, Nagari Lingkuang Aua Bandarajo, Nagari Lingkuang Aua Jambak, Nagari Lingkuang Aua Koto Dalam, Nagari Lingkuang Aua Barat dan Nagari Lingkuang Aua Hilia minimal sebesar dana yang dialokasikan untuk kegiatan

pemerintahan di masing-masing Nagari Persiapan sampai dengan ditetapkannya APB Nagari Lingkuang Aua Timur, APB Nagari Lingkuang Aua Baru, APB Nagari Lingkuang Aua Bandarajo, APB Nagari Lingkuang Aua Jambak, APB Nagari Lingkuang Aua Koto Dalam, APB Nagari Lingkuang Aua Barat dan APB Nagari Lingkuang Aua Hilia.

- (3) Biaya Pelantikan Penjabat Wali Nagari dan Peresmian Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 25 dibebankan kepada APB Nagari Lingkuang Aua.

Pasal 34

Sebelum Pemerintah Nagari Lingkuang Aua Timur, Pemerintah Nagari Lingkuang Aua Baru, Pemerintah Nagari Lingkuang Aua Bandarajo, Pemerintah Nagari Lingkuang Aua Jambak, Pemerintah Nagari Lingkuang Aua Koto Dalam, Pemerintah Nagari Lingkuang Aua Barat dan Pemerintah Nagari Lingkuang Aua Hilia dapat menetapkan Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari Lingkuang Aua tetap berlaku dan dilaksanakan di Pemerintah Nagari Lingkuang Aua Timur, Pemerintah Nagari Lingkuang Aua Baru, Pemerintah Nagari Lingkuang Aua Bandarajo, Pemerintah Nagari Lingkuang Aua Jambak, Pemerintah Nagari Lingkuang Aua Koto Dalam, Pemerintah Nagari Lingkuang Aua Barat dan Pemerintah Nagari Lingkuang Aua Hilia.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

35

Khusus Kerapatan Adat Nagari dan Lembaga Adat Nagari Lainnya, tidak dapat di mekarkan dan/atau dibentuk pada Nagari Lingkuang Aua Timur, Nagari Lingkuang Aua Baru, Nagari Lingkuang Aua Bandarajo, Nagari Lingkuang Aua Jambak, Nagari Lingkuang Aua Koto Dalam, Nagari Lingkuang Aua Barat dan Nagari Lingkuang Aua Hilia.

Pasal 36

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Perangkat Nagari Persiapan Lingkuang Aua Timur, Perangkat Nagari Persiapan Lingkuang Aua Baru, Perangkat Nagari Persiapan Lingkuang Aua Bandarajo, Perangkat Nagari Persiapan Lingkuang Aua Jambak, Perangkat Nagari Persiapan Lingkuang Aua

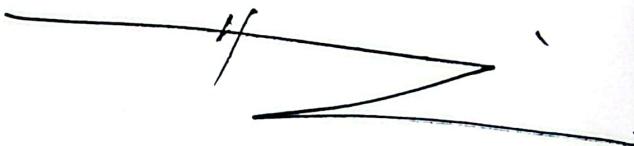
Koto Dalam, Perangkat Nagari Persiapan Lingkuang Aua Barat dan Perangkat Nagari Persiapan Lingkuang Aua Hilia diangkat menjadi Perangkat Nagari Lingkuang Aua Timur, Perangkat Nagari Lingkuang Aua Baru, Perangkat Nagari Lingkuang Aua Bandarajo, Perangkat Nagari Lingkuang Aua Jambak, Perangkat Nagari Lingkuang Aua Koto Dalam, Perangkat Nagari Lingkuang Aua Barat dan Perangkat Nagari Lingkuang Aua Hilia.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal, 17 ~~Agosto~~ 2022
BUPATI PASAMAN BARAT,



HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal, 17 ~~Agosto~~ 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**



HENDRA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI
SUMATERA BARAT : (3/3/2020)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LINGKUANG AUA TIMUR,
PEMERINTAHAN NAGARI LINGKUANG AUA BARU, PEMERINTAHAN NAGARI
LINGKUANG AUA BANDARAO, PEMERINTAHAN NAGARI LINGKUANG AUA
JAMBAK, PEMERINTAHAN NAGARI LINGKUANG AUA KOTO DALAM,
PEMERINTAHAN NAGARI LINGKUANG AUA BARAT DAN PEMERINTAHAN
NAGARI LINGKUANG AUA HILIA
DI KECAMATAN PASAMAN**

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari, Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, asal usul dan/atau hak tradisional dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat minang kabau (adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah) yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehubungan dengan adanya perkembangan dan kemajuan Kabupaten Pasaman Barat pada umumnya dan di Kecamatan pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, di perlukan adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang, Nagari mempunyai peran yang sangat besar dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga mampu menjadikan nagari defenitif untuk mengembangkan inovasi, berwawasan kedepan dan siap melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

Nagari Defenitif mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Oleh karena itu, dalam Peraturan Daerah ini Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Melakukan Penataan Nagari dengan Membentuk Nagari Baru melalui Pemekaran Nagari.

II.PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022
NOMOR 12